Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Putussibau

M. Bessiar¹

1. Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu

Korespondensi Penulis: m.bessiar@yahoo.com

Abstract

The fundamental problem of the research is the policy implementation program of waste management in Kapuas Hulu is not as expected. Therefore, The responsibility of waste management program must be handled by all of the local government and the other stakeholders. The research aim is to describe and analyze the policy process of the implementation program. The research type is a survey research by the descriptive model. There are four Kelurahan in the research, namely Kelurahan Putussibau Kota, Kelurahan Hilir Kantor, Kelurahan Kedamin Hulu and Kedamin Hilir. The research result shows that the compliance of the implementers is in the Standard Procedure Operational. But, in the legal aspect is not optimally performed. The recommendation of this research is the local government, such as Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, must be immediately issued the local regulation on waste management. Besides, the local government must plan and establish the derivative regulation of the local regulation.

Key words : The policy implementation program of waste management , Compliance, What's Happening

1. PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah sembarangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak seperti timbulnya penyakit, kota menjadi kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain.

Pada kota-kota besar dan sedang di Indonesia, kemampuan PEMDA dalam menangani sampah masih terbatas. Secara nasional, sampai tahun 2017, tingkat pelayanan baru mencapai 6,8 % dari volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi banjir di perkotaan. Permasalahan persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada

pengelolaan akhir.

Kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebenarnya telah di atur melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Peraturan Bupati No.80 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun implementasi Peraturan Daerah ini belum efektif dilaksanakan di lapangan. Belum Nampak aspek penyelesaian masalah dari peraturan daerah tersebut, padahal jika dilihat dari tujuan, sasaran dan isi dari Peraturan daerah tersebut semestinya bisa mengatasi masalah sampah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu

Setiap hari Kota Putussibau menghasilkan timbulan sampah kurang lebih dari 29,05 m³/hari (Pengelolaan Sampah DLPRKP Kab. KH, 2019) yang berasal dari perumahan, pertokoan, pedagang kaki lima dan pasar tradisional. Untuk mengelola sampah tersebut Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu memerlukan Anggaran yang sangat minim untuk Operasional dan Pemeliharaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang meliputi Gaji Tenaga/petugas, Bahan Bakar Minyak, Bengkel, TPS, TPA dan lain - lain (Pengelolaan sampah DLHPRKP Kab. KH, 2019).

Data pengelolaan sampah DLPRKP tahun 2019 sampah yang tertangani yaitu 578 ton/tahun dan Produksi sampah 1.316 ton/tahun menunjukkan bahwa dari produksi sampah dan sampah yang ditangani masih sangat jauh dari harapan.

Seperti halnya Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadapkan pada pembiayaan pengelolaan sampah. Kebutuhan anggaran tersebut di biayai sendiri dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sampah tersebut berupa retribusi, sementara usaha- usaha lain untuk peningkatan pendapatan belum dilaksanakan dengan baik. Sektor pengelolaan persampahan sumber dana pendapatan sebagai tolak ukur pengelolaan yang *self-finance* (mampu dibiayai sendiri) adalah penerimaan retribusi .

Adapun beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Putussibau adalah sebagai berikut:

1. Belum patuhnya implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kota Putussibau
2. Masih banyak terjadinya pelanggaran kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

Masalah yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini adalah bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Putussibau yang masih sangat rendah. Untuk itu upaya implementasi kebijakan pengelolaan sampah perlu dilakukan agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi Tanggung Jawab Pemerintah daerah umumnya dan Dinas Lingkungan Hidup,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu khususnya tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dalam konteks studi kebijakan, permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Kota Putussibau belum berjalan efektif. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan pada pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah tersebut. Sejalan dengan itu, penulis menetapkan ruang lingkup penelitian sebagai berikut : *“mengapa belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Putussibau”*.

Gambar 1.1 Alur Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Putussibau yang meliputi 4 (empat) kelurahan meliputi Kelurahan Putussibau Kota, Kelurahan Hilir Kantor, Kelurahan Kedamin Hulu dan Kedamin Hilir.

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010) Subjek dalam penelitian ini adalah Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHPRKP, petugas angkut, pekerja lapangan/petugas kebersihan dan masyarakat. Penentuan subyek penelitian tersebut menggunakan teknik purposive.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara.
2. Dokumentasi
3. Observasi

Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka dari data yang terkumpul, akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992):

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Implementasi merupakan proses penting dalam suatu kebijakan. Dengan implementasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka dapat dilihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap target sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Banyak kebijakan yang tidak jelas dampak dan manfaatnya terhadap target sasaran, dikarenakan proses implementasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam kebijakan tersebut, bahkan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan atau tidak

dilaksanakan. Efektifnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan. variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi yang efisien. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Putussibau, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang menggunakan dua variabel utama yaitu kepatuhan(*compliance*) dan *what's happening and why?* (apa yang terjadi dan kenapa).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan proses penting dalam suatu kebijakan. Dengan implementasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka dapat dilihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap target sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Banyak kebijakan yang tidak jelas dampak dan manfaatnya terhadap target sasaran, dikarenakan proses implementasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam kebijakan tersebut, bahkan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan. Efektifnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan. variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi yang efisien. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Putussibau,

peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang menggunakan dua variabel utama yaitu kepatuhan(*compliance*) dan *what's happening and why?* (apa yang terjadi dan kenapa?) yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini :

Kepatuhan (*Compliance*)

Ripley dan Franklin menjelaskan variabel *compliance* sebagai tingkat kepatuhan implementor dalam bertindak, apakah sesuai dengan ketentuan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan. Tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kepatuhan mengacu pada perilaku implementor itu sendiri, apakah sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Serta melihat sejauh mana pemahaman implementor dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dan sesuai dengan apayang ada dalamkebijakan.

Kebijakan yang mengatur bagaimana pelaksanaan Pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi, Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini menjadi pedoman bagaimana implementor bertindak dalam melaksanakan program. Untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan implementor dilapangan maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama adalah

bagaimana implementor memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menerjemahkan kebijakan dalam bentuk tindakan yang nyata, hal ini berkaitan dengan bagaimana proses transfer informasi terjalin antara para implementor sehingga semua informasi tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Serta yang kedua adalah bagaimana implementor berperilaku dilapangan sesuai dengan standar peraturan yang telah ada, dan melihat apakah perilaku implementor tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program atau tidak.

Pemahaman implementor terhadap kebijakan

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan/program, implementor harus memahami isi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan setiap langkah dan proses implementasi suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi implementor dilapangan nantinya. Pemahaman implementor terhadap isi kebijakan akan berimplikasi pada sikap implementor, yang akan menunjukkan sikap mendukung atau tidak dalam sebuah pelaksanaan program.

Kebijakan pengelolaan sampah di Putussibau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai *leading sector*, pengawas dan petugas sampah sebagai implementor.

Dimana, setiap implementor memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan tupoksi dari OPD. Agar para implementor dapat mengetahui, mengerti dan memahami isi dari sebuah kebijakan, diperlukannya sosialisasi kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini, hampir semua implementor tidak mengetahui, mengerti dan memahami isi dari kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, implementor mengetahui tentang kebijakan pelaksanaan pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilaksanakan di Putussibau. Namun, mengenai tupoksi-nya, implementor belum melaksanakan secara maksimal. Seperti hal-nya ketika peneliti bertanya mengenai pelaksanaan tupoksi kepada implementor, dengan menjawab, pelaksanaan pengelolaan sampah lebih di tekankan lagi pelaksanaannya di petugas persampahan.

Ketidaktahuan dari implementor terhadap Juklak pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh kepala daerah, dapat menyebabkan kekeliruan terhadap pelaksanaan tugas oleh implementor tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemegang kebijakan. Sehingga Implementor harus mencari tahu sendiri. Namun implementor beralih bahwa PERDA tersebut hanya merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri, jadi secara keseluruhan itu sama saja. Jadi mereka merasa tidak perlu tahu tentang adanya perda tersebut. Hal ini lah yang dapat mengakibatkan tidak selarasnya antara

tugas yang ada didalam perwako dengan yang dilaksanakan oleh implementor.

Selain dari data wawancara, pahamnya implementor terhadap kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kemampuan implementor menerjemahkan kebijakan dalabentuk memasukkan program dan kegiatan dalam bentuk tindakan nyata yang berhubungan untuk mendukung jalannya kebijakan pengelolaan sampah in dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perilaku Implementor

Perilaku implementor dapat dilihat dari bagaimana sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Kesesuaian sikap implementor yang terlibat dengan kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Dimana seluruh implementor mempunyai tugas pokok masing-masing yang sudah diatur dalam perda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, terdapat tugas masing-masing implementor dan belum mengatur fungsi dari pada implementor. Peraturan ini menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut akan peneliti jelaskansatu-persatuperilakuyangditunjukkanolehimplementor dalam melaksanakan program berdasarkan tugas dan fungsinya masing- masing, seperti dibawah ini:

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dinas baru terbentuk dan dalam pelaksanaannya mengikuti nomenkulatur provinsi yaitu pengabungan dua lembaga/kementrian.

***What's Happening and Why* (Apa YangTerjadi dan mengapa)**

Pendekatan ini menanyakan bagaimana implementasi berjalan, tujuan yang sedang dicapai, bagaimana keberhasilan implementasi dilandasi dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Terkait dengan variabel ini, penelitian Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Putussibauyang peneliti lakukan ingin melihat bagaimana implementasi berjalan, siapakah implementornya, bagaimana sejumlah sumber digunakan selama implementasi berlangsung, dan hambatan-hambatan apa yang timbul saat implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah.

Variabel *What's Happening* terbagi atas lima indikator, agar dapat mengukur pelaksanaan suatu program. Yang akan peneliti jelaskan pada bagian dibawah ini, yaitu:

Banyaknya Aktor yang Terlibat (*The Profusion of Actors*)

Indikator ini menjelaskan bahwa proses implementasi tidak hanya melibatkan satu aktor saja, melainkan banyak aktor. Implementor yang terlibat dalam

implementasi suatu program tidak hanya yang ada pada ruang lingkup pemerintahan dan birokrat, namun juga melibatkan aktor diluar pemerintahan seperti organisasi non pemerintah yang disebutkan sebagai pihak yang berkepentingan.

Jumlah dan Identitas (*Number and Identity*)

Dalam indikator ini, *number* dijelaskan sebagai siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi atau berapa banyak aktor yang terlibat. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, implementor yang terlibat yaitu lebih kurang sebanyak 3 elemen, yaitu Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Petugas Pengawas, dan Petugas Sampah. Untuk tabel aktor yang terlibat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Implementor Yang terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Putussibau

No.	Aktor	Instansi / organisasi
1.	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup, PRKP
2.	Petugas Pengawas	Dinas Lingkungan Hidup, PRKP
3.	Petugas Sampah	Dinas Lingkungan Hidup, PRKP

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020

Dari Tabel 1 diatas dapat dilihat banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan

Sampah di Kota Putussibau.

Sedangkan *Identity* mengacu pada kedudukan (Tupoksi) implementor dalam suatu kebijakan. Dimana peran Instansi/orgsanisai/ lembaga/ kelompok ini sangat berperan dengan mendukung pelaksanaan yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengelolaan sampah. Instansi/orgsanisai/ lembaga/ kelompok memiliki peran masing-masing dalam perbantuan dinas DLHPRKP Kabupaten Kapuas Hulu. Yang akan dilihat pada penelitian ini adalah bagaimana implementor yang terlibat dalam peran DLHKPR Kabuapten Kapuas Hulu untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi, Pelayanan/Kebersihan Sampah.

Dari pemaparan diatas, dilihat dari model implementasi Ripley dan Franklin dapat diketahui bahwa dari segi jabatan maka dapat dikatakan bahwa implementor telah sesuai dengan implementasi. Begitu juga dengan aktor seperti Organisasi Pramuka, Radio Sika, dan Duta Lingkungan sudah sangat mencukupi jumlahnya untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Sedangkan dari segi *identity* petunjuk implementasi belum mengatur sedemikian rupa mengenai petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, tugas pokok dan fungsi dari implementor yang satu dan yang lainnya, sehingga implementor tidak dapat bekerja sesuai dengan peran masing-masing sehingga terjadi tumpang

tindih pekerjaan. Dan, dalam pelaksanaan tupoksi implementor masih belum maksimal, karena sebagian besar dari implementor tidak mengetahui apa tupoksi nya, dengan alasan mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Peran dari Pihak yang berkepentingan (The Role of Interest Group)

Peran dari kelompok kepentingan yang dimaksud dalam indikator ini adalah sejauh mana kelompok kepentingan mendukung atau tidak kebijakan. Sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan saja, namun secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang berada di dalam dan luar lingkup kebijakan. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ini, peneliti melihat apakah ada kelompok kepentingan seperti Organisasi Pramuka (Saka Kalpataru, Kwarcam Kapuas Hulu) yang bergerak dalam bidang lingkungan, Radio Sika sebagai Media Massa, Duta Lingkungan Hidup dalam menyampaikan secara langsung kepada masyarakat dan Kelompok TPS 3R dalam pengurangan, pemilahan dari sumbernya dan pendaur ulang sampah, yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Putussibau.

Organisasi Pramuka

Organisasi Pramuka merupakan salah satu organisasi kependuan yang didalam kependuan ini dibagi bagi

beberapa Saka. Saka yang aktif bergerak dalam menjaga lingkungan yaitu SAKA KALPATARU. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Pramuka bereperan sebagai pendukung implementasi pengelolaan sampah di Putussibau.

Radio Sika (RASIKA)

Radio Sika (RASIKA) merupakan salah satu Radio binaan dibawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pelaksanaan implementasi Radio Sika berperan sebagai penyampaian informasi implementasi pengelolaan smpah kepada media.

Duta Lingkungan

Duta Lingkungan hadir dalam perannya sebagai garis depan yang secara garis besar bertugas untuk menyuarakan gagasan tentang lingkungan pada masyarakat luas.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R (Reduse, Recycle and Recycle)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R ini mempunyai peran mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan berperan dalam menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Ketiadaaan Hirarki (Lock of Hierarchy)

Sangat penting untuk melihat bagaimana hubungan atau ada tidaknya

garis koordinasi antara implementor. Hubungan rantai koordinasi bahkan lebih menyebabkan kompleksitas pelaksanaan implementasi dibandingkan banyaknya yang terlibat. Adanya garis koordinasi dapat memaksimalkan proses implementasi. Hubungan atau garis koordinasi yang terbentuk dalam proses implementasi berupa bagaimana formal melaksanakan atau melakukan koordinasi kepada instansi/ lembaga/ organisasi/ kelompok dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara baik.

Dalam penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah ini, peneliti ingin melihat bagaimana garis koordinasi yang terjadi pada:

- a) Hubungan antar Staf yang terlibat
- b) Hubungan Organisasi/KSM dengan OPD yang terlibat.

Hubungan atau garis koordinasi yang terbentuk dari pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah tidak adanya keharusan untuk setiap OPD yang terlibat memberikan laporan dan sanksi kepada OPD lainnya jika tidak melaksanakan koordinasi balik. Hubungan yang terjalin hanya sebatas saling mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan Sampah, tidak ada kewenangan dari OPD lainnya untuk memaksa dan memeriksa pelaksanaan tugas dari OPD lainnya.

a. Hubungan Antar Staf yang terlibat

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, seluruh dinas yang

terlibat pelaksanaan menjalin hubungan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi, dan saling membantu satu sama lainnya jika dibutuhkan.

b. Hubungan Organisasi/KSM dengan OPD yang terlibat

Kebijakan Pengelolaan sampah merupakan muara dari kegiatan kebijakan pengelolaan sampah. Pada lingkungan masyarakat kebijakan pengelolaan sampah diterapkan. Semua kegiatan masyarakat harus mencerminkan kebersihan lingkungan yang bersih dan sehat, seperti visi dan misi yang harus mencakup mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta terciptanya hunian yang sehat dan produktif. Dengan visi dan misi tersebut masyarakat dapat menjalankan kebiasaan pada kehidupan sehari-hari, agar menjaga dan melestarikan lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, masyarakat harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PRKP Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu masyarakat bekerja sama dengan OPD yang ada di Kota Putussibau, seperti dengan Pramuka, KSM Pengelola Sampah, dan lain-lain.

Perkembangan dan Kerumitan Program (*The Proliferation and Complexity of Government Programs*)

Dalam variabel ini peneliti ingin melihat sejauh mana pemerintah mempersiapkan kebijakan pengelolaan sampah, menyangkut kelengkapan-kelengkapan program, seperti adanya SOP (*standar operasional prosedur*), petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk

teknis yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah sejalan dengan program-program pemerintah lainnya untuk menciptakan Kotabersih dan sehat. Beberapa contoh program lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan pengelolaan sampah yaitu Program Adiwiyata yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Berlandaskan pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Partisipasi semua pada unit Pemerintah (*The Participation of Governmental Unit at All Territorial Levels.*)

Besarnya dukungan publik terhadap penerimaan suatu program memberikan besarnya dampak positif bagi proses implementasi program pemerintah. Dukungan publik yang mengikuti siklus tertentu menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, pada hakikatnya dukungan publik dalam menciptakan keberhasilan implementasi suatu program mensyaratkan adanya dukungan dari pemerintah.

Dukungan pemerintah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, karena apa yang menjadi tanggapan dari pemerintah yang akan menentukan apakah program berhasil di implementasikan atau tidak, seperti program adiwiyata yang dilakukan DLHPRKP Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sekolah-sekolah. Dimana program ini sangat membantu program pemerintah seperti pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dimana pada sekolah-sekolah sampah yang dihasilkan umumnya seperti kertas apabil dikumpulkan dan dijual mempunyai nilai ekonomi.

Selain dukungan dari unit pemerintah sebagai implementor, diperlukan juga dukungan dan partisipasi dari siswa sekolah yang menjadi tempat dilaksanakan Program Adiwiyata, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, siswa yang ada disekolah sangat mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan disekolah nya.

Dukungan yang diberikan pemerintah seperti pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana seperti tempat sampah tiga warna, serta membuat pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Dalam pelaksanaan program, pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, dan didukung dengan data pelengkap dan kutipan wawancara, di analisis menggunakan teori Ripley dan Franklin, maka dapat peneliti simpulkan

bahwa untuk variabel partisipasi pada semua unit pemerintah pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sudah baik, dengan adanya kesadaran sekolah sekolah dalam pengadaan wadah sampah untuk kebersihan sekolahnya.

Faktor-faktor Yang Tidak Terkendali yang mempengaruhi Implementasi
(The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation)

Dalam pelaksanaan implementasi sebuah program atau kebijakan, tidak pernah terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul diluar kendali implementor, sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi berbagai faktor atau gangguan teknis yang muncul, maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, faktor yang tidak terkendali yaitu perilaku menjaga kebersihan dari warga masyarakat atau kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, dan faktor geografis dari lingkungan masyarakat tersebut. Perilaku bersih tertanam pada pribadi manusia itu sendiri, akan sulit diarahkan jika dalam diri manusia tidak tertanam perilaku cinta lingkungan, sehingga masih kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Kesulitan dalam mengarahkan warga masyarakat untuk

membuang sampah pada tempat yang telah disediakan

Selain dari permasalahan diatas, terdapat faktor lain yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, diantaranya keterbatasan lahan atau letak bangunan TPS yang untuk wilayah yang belum terjangkau pelayanan sampah. Hal tersebut menjadi faktor yang tidak bisa dikendalikan, karena keterbatasan lahan dan keterbatasan dana, sehingga masih ada masyarakat yang tidak bisa terlayani. Karena dalam pengelolaan sampah diharuskan adanya beberapa komponen yang mengharuskan DLHPRKP dapat melayani, yaitu memiliki sarana dan prasarana pendukung, seperti akses menuju tempat pengumpulan sampah dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah atau gerobak. Salah satu alternatif yaitu masyarakat menyiapkan lahan/tempat untuk TPS yang disepakati warga masyarakat dan DLHPRKP yang bisa dilewati oleh kendaraan pengangkut sampah baik itu roda empat atau roda tiga. Kemudian masyarakat yang berada didalam gang membuang sampah ketempat TPS tersebut.

Dari hasil tersebut diatas dapat dilihat bahwa faktor yang tidak terkendali dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor manusia, dana dan faktor geografis. Faktor manusia yaitu masih kurangnya kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan. Masih banyak nya ditemukan masyarakat yang membuang sampah pada sembarang

tempat, serta masih adanya sampah yang ditemukan berserakan. Selain itu, faktor finansial atau anggaran yang masih minim dialokasikan untuk terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah.

4. Simpulan dan Rekomendasi

4.1. Simpulan

Kepatuhan para implementor yang terlibat dalam pengelolaan sampah (pengawas dan petugas sampah) sudah mengikuti arahan atasan dalam pelaksanaannya, namun kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan atau yudisial secara hukum belum optimal atau tepat sasaran. Kemudian kepatuhan masyarakat untuk membuang sampah masih disembarang tempat dan masih minimnya kesadaran untuk membuang sampah kepada tempatnya.

Implementasi didalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan apa yang menjadi tolak ukur, namun karena keterbatasan kapasitas armada, tempat penampungan sampah (TPS) yang dimiliki dan belum adanya pengelolaan secara sistematis mengakibatkan sampah belum sepenuhnya teratasai dengan baik.

4.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas dapat diambil benang merah sebagai saran yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3 harus sesegera mungkin menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu Segera merancang dan menetapkan turunan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Bupati,

Referensi

- Anderson. E. J.,(1997)., *Public Policy Making*. New York: HRW.
- Bintoro., T. (1994)., *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung, Jakarta.
-,1993.*Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Praktek*. Jakarrta: LP3ES.
- Dye, T.R. (1992) . *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs
- Dunn, W. (1999) . *Manajemen Analisis Kebijakan Publik, (edisi ke dua)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Gaffar, A.. (1998). *Publik Policy: State Of The Disipline, Models and Proces*. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Islamy, M. I. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buni Aksara.
- Miles, M. B dan Huberman A, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mazmanian, D. H. And Paul A. S. (1998). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya, A.R., (2005).

- Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Nugroho, D R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: Gramedia.
- Putra, F. (2001). *Pradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Randall B. .y dan Grace, A. F.(1985). *Policy Implementation and Bureaucracy, Publishier Dorsey Press.*
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. (2000). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran Nagel.* Yogyakarta: Balairung
- Wahab, A.S. (2008). *Analisa Kebijaksanaan.* Jakarta: Buni Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis.* Jakarta: Intermedia
- Winarno, B..(2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dokumen Perundang Undangan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan sampah;
- Peraturan Daerah Kapuas Hulu No. 4
Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan /
Kebersihan